

BAB IV

OPINI PUBLIK SEBAGAI

PENYEBAB INGGRIS KELUAR DARI UNI EROPA

Dalam bab IV ini penulis akan menguraikan terkait dengan pilihan Rakyat Inggris terhadap keputusan keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Yang mana sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kedudukan rakyat amatlah berpengaruh penting di dalam sebuah keputusan negara. Keputusan Rakyat Inggris bukan tanpa alasan, mengingat Inggris juga telah lama bergabung dengan Organisasi Kawasan Uni Eropa ini. Publik Opini yang terbentuk dalam tataan rakyat Inggris memandang bahwa selama keanggotaan Inggris di Uni Eropa tidak memberikan pengaruh signifikan terkait dari sektor pendanaan maupun Imigran. Penulis mencoba untuk menganalisis alasan tersebut melalui implimentasi teori Kebijakan Luar Negeri dari pemikiran James T. Shotwell yang merupakan seorang tokoh idealis Liberal.

Setiap negara memiliki pola Politik Luar Negeri yang berbeda dengan negara lain, terlebih lagi negara tersebut adalah negara yang otoriter atau demokratis. Dibutuhkan kerangka pemikiran yang berbeda dalam proses merumuskan sebuah kebijaksanaan suatu negara. Seperti misalnya, pada negara otoriter yang cenderung lebih agresif dan berbeda dengan negara Demokratis yang lebih cenderung bersikap kooperatif dengan negara maupun organisasi kawasan

atau internasional (Ikbenberry, 1997, hal. 12). Salah satu sikap kooperatif Inggris adalah dengan bergabungnya Inggris dengan organisasi Internasional seperti G7,G20, NATO, Uni Eropa dan lain sebagainya.

Inggris merupakan sebuah negara dengan demokrasi liberal. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan keputusan dan dijalankan oleh pemerintah dalam negara tersebut.

Kemudian, dibawah ini akan disampaikan beberapa kerugian-kerugian yang dirasakan rakyat Inggris selama keanggotaan Inggris pada Uni Eropa terkait dengan pendaanaan dan pertumbuhan Imigran di negara Inggris.

A. Opini Publik Rakyat Inggris terkait Pendanaan

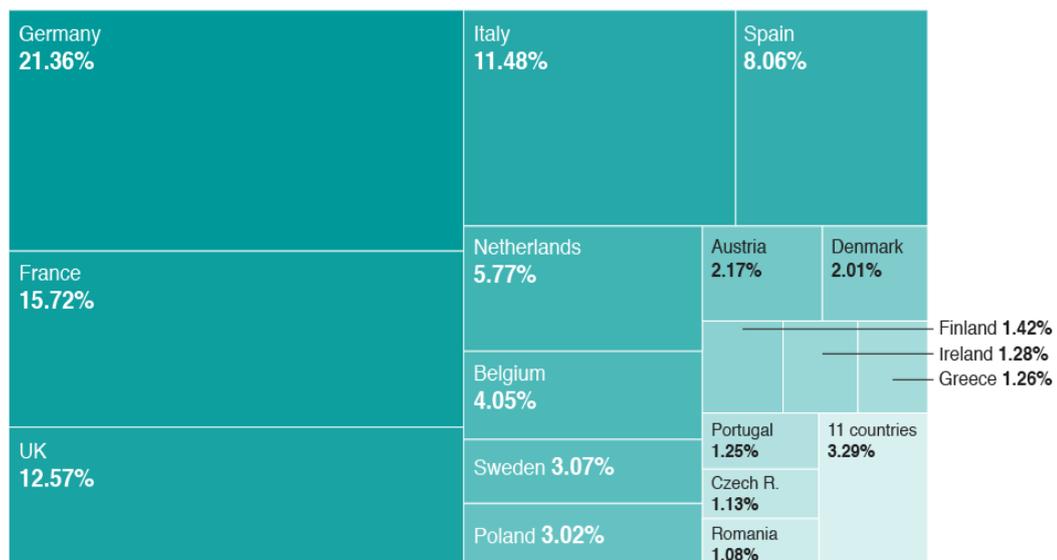
Dalam bidang pendanaan, terkait dengan ekonomi yang merupakan faktor terbesar dan riskan sangat mempengaruhi Inggris keluar dari Uni Eropa. Pada saat itu Inggris sedang dilanda krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 yang kemudian membawa laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di Inggris, Inggris kemudian melirik kesuksesan peningkatan ekonomi yang terjadi di enam negara pemrakarsa Uni Eropa. Keadaan tersebutlah yang kemudian melatabelakangi Inggris bergabung dengan *European Community*.

Inggris merupakan salah satu negara dengan pendapatan nasional tinggi dan masyarakat bisa terbilang sangat makmur. Kemampuan finansial tinggi hampir setara dengan negara-negara besar lainnya di Uni Eropa seperti Jerman, Perancis, dan Inggris harus membayar iuran yang tinggi. Sementara negara dengan kemampuan finansial tidak sekuat negara anggota lain seperti Hungaria, Polandia, dan Yunani dapat membayar lebih rendah.

Inggris merupakan penyumbang iuran terbesar ketiga setelah Jerman dan Perancis. Dengan total dana terkumpul 145 miliar Euro (2.168 triliun rupiah) pada tahun 2015, artinya iuran 12,57% yang dibayarkan Inggris tahun lalu adalah 18,2 miliar Euro (272 triliun rupiah).

Gambar 4.1 EU Budget: Contributions by Country

2015 EU budget 145bn euros: Contributions by country (%)

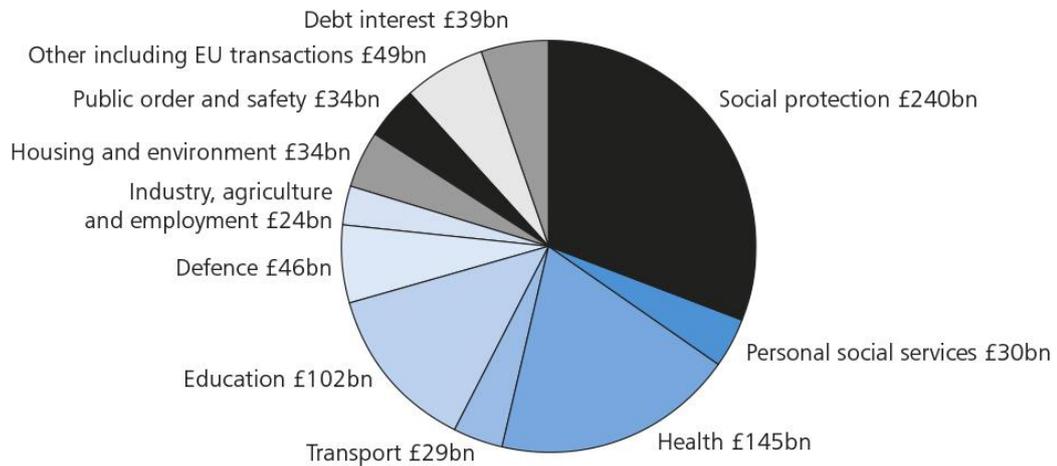


Source: European Commission/HM Treasury

Sebagai negara ketiga penyumbang iuran atau kontribusi terbesar di Uni Eropa, Inggris tentu mempertanyakan *feedback* yang telah diberikan oleh Uni Eropa terhadap negaranya. Suatu kerjasama negara dengan organisasi kawasan Internasional ataupun negara dengan negara dikatakan saling menguntungkan apabila kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. Besarnya iuran atau kontribusi yang dibayarkan oleh Inggris kemudian ikut melatarbelakangi evaluasi kepentingan Inggris terhadap Uni Eropa. Sedangkan, pada referendum 2016 Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, hal itu merupakan tindakan yang tepat dalam tujuan meminimalkan anggaran pembelanjaan negara, sehingga dana yang biasa dikontribusikan untuk keperluan keanggotaan Uni Eropa, dapat dialihkan untuk membiayai sektor-sektor yang dirasa perlu dan mendesak.

Gambar 4.2 Alokasi budget Inggris terhadap public sector spending 2016-17

Chart 1: Public sector spending 2016-17



Sources: Office for Budget Responsibility 2016-17 estimates. Illustrative allocations to functions are based on HMT analysis including capital consumption figures from the Office for National Statistics. Figures may not sum due to rounding.

Mantan Wakil Perdana Menteri di bawah Margaret Thatcher mengatakan bahwa jika kita keluar dari keanggotaan Uni Eropa, maka kita menghemat 7 miliar pound per tahun. Anggaran tersebut dapat dialihkan kepada pendanaan dalam sektor-sektor lain yang lebih bermanfaat terutama pada sektor ekonomi (Europe, 2016). Apabila kita melihat grafik diatas, perbandingan jumlah UK bugeting dan sektor lain seperti pendidikan, pertahanan, kesehatan, industri dan lain sebagainya adalah sekitar 1,5% dari jumlah total keseluruhan pembayaran sektor publik, meskipun angka presentase tertinggi masih terfokus pada sektor perlindungan sosial, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa artinya juga memutus mata rantai kontribusi budgeting Inggris terhadap Uni Eropa, sehingga secara otomatis Inggris dapat menyimpan atau mengalihkan pendanaan sekitar 1,

5% terhadap sektor yang dianggap memiliki presentasi terendah misalnya saja dalam grafik tersebut pada sektor industri.

Melalui kontribusi besar Inggris terhadap tujuan Uni Eropa sejauh ini telah memberikan pertumbuhan berkelanjutan seperti: sumber daya alam, yang mencakup dukungan untuk pembangunan pedesaan, dan langkah-langkah lingkungan. Mempromosikan daya saing untuk meningkatkan pertumbuhan dan pekerjaan, dan juga mendukung ekonomi, sosial dan teritorial kohesi. Dengan semua anggota Uni Eropa, Inggris telah mengadopsi struktur dimana organisasi-organisasi tertentu seperti mengelola, membayar, sertifikasi, dan audit dari penerimaan kontribusi langsung Inggris. (Comptroller, 2016)

Pada Referendum 2016, Rakyat Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Inggris akan tetap menjadi anggota Uni Eropa sampai proses negosiasi dengan Uni Eropa selesai. Inggris akan terus berkontribusi anggaran Uni Eropa sampai resmi terlepas dari Uni Eropa. Kontribusi Inggris terhadap anggaran Uni Eropa dilakukan dalam cara yang sama seperti negara-negara anggota lainnya. Namun, Inggris menerima rebate pada kontribusinya yang bersih. Rebate diperkenalkan pada pertengahan 1980-an untuk mengatasi masalah di Inggris membuat kontribusi bersih yang relatif besar untuk anggaran Uni Eropa. Setelah rebate diterapkan Kontribusi Inggris anggaran Uni Eropa adalah sekitar £12,9 miliar pada tahun 2015. Inggris menerima total sektor publik penerimaan dari anggaran Uni Eropa dari £4,4 miliar, membuat kontribusi bersih diperkirakan sebesar £8.5 miliar pada tahun 2015.

Bagan 4.3 UK Contributions to, and receipts from, the EU budget, £ billion

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gross Contributions	14.1	15.2	15.4	15.7	18.1	18.8	17.8
UK rebate	-5.4	-3.0	-3.1	-3.1	-3.7	-4.4	-4.9
Total Contributions	8.7	12.2	12.2	12.6	14.5	14.4	12.9
Total Public Sector Receipts	-4.4	-4.8	-4.1	-4.2	-4.0	-4.6	-4.4
Net Contribution	4.3	7.4	4.8	18.5	10.5	9.8	8.5

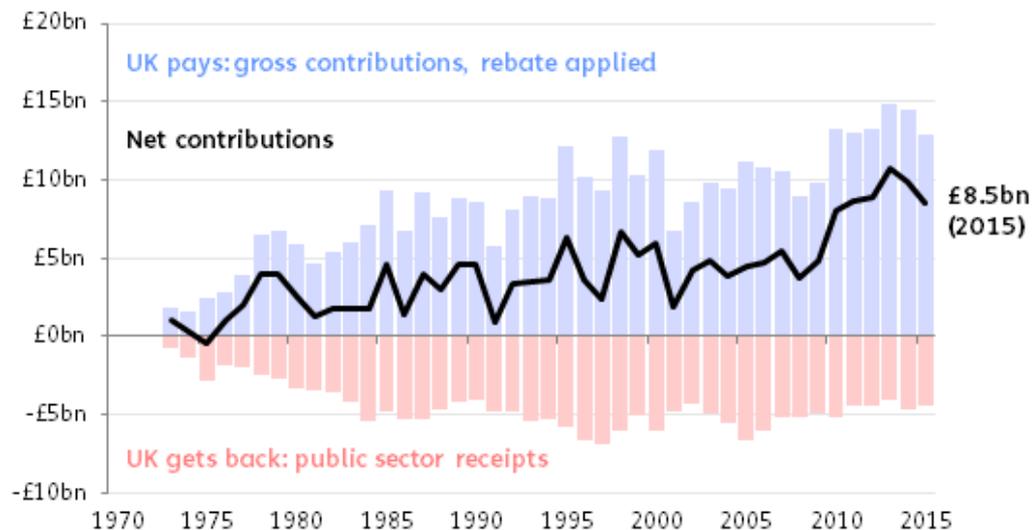
Sumber: HM Treasury, European Union Finances, latest edition published

December 2015, Cm 9167

Bagan 4. 3 UK payments to EU budget

UK payments to EU budget

Balance of UK contributions to and public sector receipts from the EU budget, adjusted for inflation, calendar years



Source: HM Treasury European Union Finances 2015, House of Commons Library analysis and HM Treasury GDP deflators (8 January 2016)



B. Opini Publik Rakyat Inggris terkait Imigran

Setiap keputusan dan kebijakan Uni Eropa sangat mengikat dengan negara-negara anggotanya. Keputusan tersebut diambil oleh badan Uni Eropa yakni Komisi Eropa (*European Commission*). Untuk kasus penanganan migran dari timur tengah yang berdatangan ke Eropa, Komisi Eropa memutuskan bahwa Eropa akan membukakan pintu bagi para migran. Negara dengan keuangan tidak terlalu mapan seperti Yunani tentu mengalami kesulitan dengan kebijakan ini.

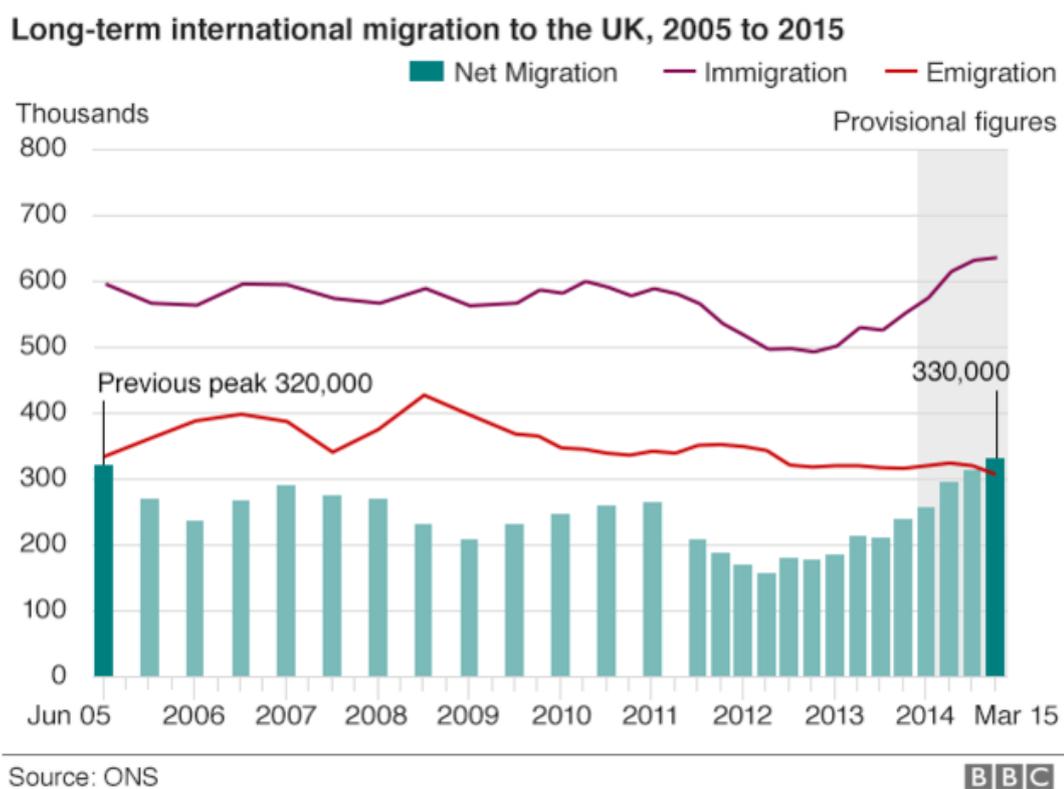
Mereka baru saja mendapat pinjaman setelah dililit hutang dan tidak mampu membayar hutangnya, namun sekarang harus membiayai para migran. Masalah ini juga dialami oleh negara anggota lain, bahkan yang keuangannya lebih baik seperti Inggris sekalipun.

Meski kesiapan dalam menerima imigran sedikit mengalami kesulitan, migrasi memiliki dampak positif pada ekonomi Inggris. Menurut perhitungan, varian migrasi yang tinggi akan meningkatkan surplus anggaran di Inggris. migrasi yang tinggi akan menambah 0,8% pertumbuhan ekonomi sedangkan migrasi yang rendah justru akan akan memotong keluaran ekonomi dan ukuran ekonomi 0,8%. (2016)

Migrasi merupakan faktor penting dalam perhitungan Inggris ekonomi dan fiskal. Mengingat hubungan langsung antara migrasi memberikan dampak atau arus positif terhadap perkiraan pertumbuhan masyarakat, tingkat Ketenagakerjaan dan pajak secara langsung akan meningkat (Counsel, the impact on the UK and the EU, 2016, hal. 18). Imigran secara khusus memiliki kewajiban pajak rata-rata yang dibayar kepada Inggris. Sejak tahun 2000 telah imigran berasal dari Uni Eropa telah menyumbang lebih dari 20 miliar pound untuk UK keuangan publik antara 2001 dan di tahun 2011 Uni Eropa migran menyumbang 64% pajak negara Inggris. Sebagai perbandingan, Imigran berasal dari Negara Non-Uni Eropa telah memberikan kontribusi sekitar 5 miliar pound untuk keuangan Inggris dalam periode yang sama.

Akan tetapi sangat disayangkan keuntungan ekonomi yang didapatkan negara tidak sejalan dengan keuntungan yang didapatkan masyarakat lokal Inggris. Sederhananya, tidak dapat menutup kerugian yang dirasakan oleh rakyat Inggris. Dengan datangnya migran ke negara Inggris, maka hal tersebut akan mengancam keberlangsungan kehidupan rakyat Inggris terkait dengan jumlah tenaga kerja. Meskipun Inggris merupakan negara modern dengan industrial terbesar di Eropa, jumlah lapangan pekerjaan pun akan semakin menyempit manakala migran datang ke negara tersebut. Migran yang datang ke negara Inggris berasal dari berbagai macam negara di dunia. Jumlah migran terbanyak yang datang ke Timur Tengah. Imigran menjadi salah satu faktor alasan suara terkuat bagi kubu yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan alasan jumlah mereka terlalu banyak, terutama dari negara-negara Eropa timur yang menjadi anggota Uni Eropa (Indonesia, 2016). Arus imigran dapat dibendung jika Inggris keluar dari Uni Eropa karena tak akan terikat prinsip pergerakan manusia secara bebas sebagaimana ditetapkan blok ekonomi tersebut. Angka statistik menyebut jumlah imigran asal UE menuju Inggris di bawah aturan gerakan kebebasan mencapai 270 ribu per tahun lalu. Jumlah tersebut termasuk 77 ribu orang yang datang tanpa pekerjaan. Sementara itu, secara keseluruhan jumlah migrasi, termasuk gelombang migrasi dari luar Uni Eropa, mencapai 333 ribu hingga Desember 2015 (Brexit Jalan Keluar Atasi Gelombang Imigran, 2016).

Gambar 4.4 International migration to the UK 2005-2015

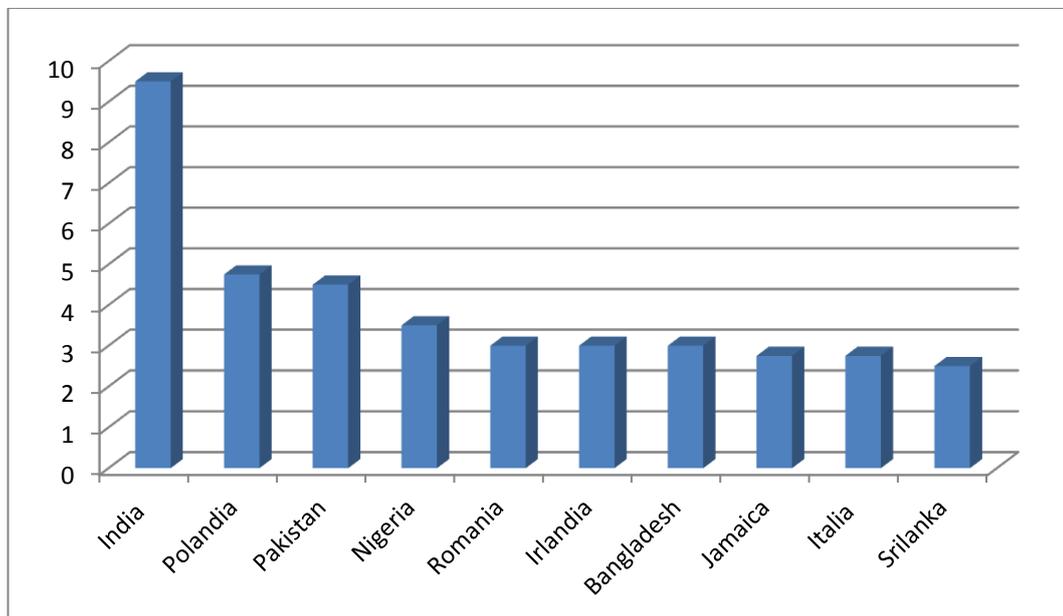


Kota dengan jumlah penduduk terpadat dan diduduki oleh para imigran terbanyak adalah London. Total Kelahiran orang asing penduduk Inggris meningkat lebih dari 50% antara tahun 1993 dan 2014, yaitu dari 7 sampai hampir 13,1%. Selama periode yang sama, pangsa warga negara asing naik 3,6-8,5%, sedangkan pendatang baru meningkat 1,4-2,7%. Ada persentase peningkatan yang signifikan dalam pangsa orang asing kelahiran total penduduk Inggris selama

periode 2004-2008 (observatory, 2016). Para Imigran yang datang ke London didominasi terbanyak adalah dari imigran berasal dari negara India.

Grafik 4.5 Top 10 countries of birth of migrants in London, 2014

Chart provided by www.migrationobservatory.ox.ac.uk

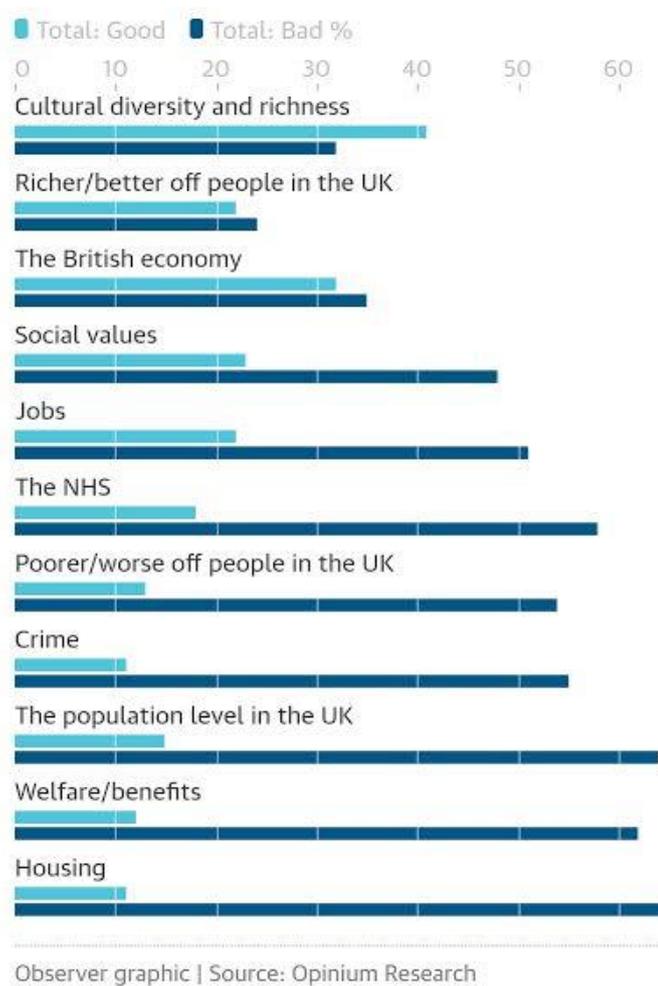


Dampak meningkatnya Imigran tidak hanya terkait dengan jumlah lapangan kerja saja, akan tetapi terkait dengan keamanan bersama. Semakin meningkatnya, jumlah pengangguran dalam suatu negara maka akan semakin meningkatkan tingkat kriminalitas yang terjadi pada negara tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi koreksi bersama antara pemerintah Inggris dan rakyat Inggris sendiri. Permasalahan Imigran bukanlah permasalahan yang sepele, permasalahan ini harus ditangani secara serius oleh pemerintahan Inggris.

Keputusan Keluarnya Inggris dari Uni Eropa dianggap sebagai keputusan yang sangat ideal dan efektif, dalam memangkas jumlah imigran yang datang dari berbagai negara di dunia apabila dibandingkan pemerintah harus membuat sebuah regulasi baru terkait dengan pengurangan imigran. Peraturan tersebut adalah regulasi sistem sortir, Sistem sortir imigran serupa pertama kali diimplementasikan pemerintah Australia pada 1989. Sistem itu berlaku bagi migran berbasis ekonomi dan lainnya untuk pengungsi dan para pencari suaka.

Inggris bukan merupakan bagian dari Schengen, artinya tidak adanya kontrol perbatasan untuk warga negara Uni Eropa. Namun, kebebasan pergerakan (serta barang-barang, modal dan Jasa) berlaku, yang berarti bahwa warga negara Uni Eropa dapat masuk ke Inggris untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Inggris menginginkan kontrol penuh terhadap sistem imigrasi. Kebebasan pergerakan warga negara di Uni Eropa memungkinkan setiap warga negara Uni Eropa untuk tinggal dan menetap di Inggris. Referendum 2016 Inggris menghasilkan keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa maka Inggris harus tergantung pada kesepakatan bernegosiasi dengan Uni Eropa baik itu membatasi bentuk migrasi tenaga kerja dari Uni Eropa. (International, hal. 7)

Gambar 4.6 Hasil survei lembaga Inggris terkait dengan Imigran



Dari survei lembaga opinium research Inggris pada tahun 2016 diatas dihasilkan bahwa Efek dari imigrasi sekarang lebih besar daripada manfaat yang didapat terkait dengan perdagangan Uni Eropa bahwa sebanyak

54% setuju sementara 21% rakyat Inggris mengatakan tidak setuju. Adanya Imigrasi yang masuk ke Uni Eropa telah menguntungkan orang-orang yang bisa dikatakan kaya di negeri Inggris dengan survey menyatakan bahwa 46% setuju 21% tidak Setuju. Sementara itu, 44% rakyat Inggris percaya bahwa hak warga negara Uni Eropa untuk hidup, bekerja atau pensiun di setiap negara Inggris akan cenderung buruk (merugikan) bagi rakyat Inggris sedangkan 32% percaya hal tersebut adalah baik. Di antara mereka mendukung *Brexit*, 69% percaya Inggris dapat bergerak secara bebas dan 17% dari tetap pendukung setuju untuk tetap pada Uni Eropa. Imigrasi dari Uni Eropa kemungkinan besar harus dilihat sebagai hal yang baik di kota besar seperti London, wilayah yang paling beragam secara budaya, (56%) dan kemungkinan besar harus dilihat sebagai hal yang buruk di Wales (66%).

Imigrasi Uni Eropa dianggap memiliki dampak negatif pada setiap bidang kehidupan nasional Inggris dengan pengecualian dari keragaman budaya dan kekayaan. Dampak negatif yang paling menonjol di mana 65% mempertimbangkan dampak buruk dan hanya 11% yang baik (-54). Daerah lain di mana dampak dipandang sebagai sangat negatif termasuk kesejahteraan atau manfaat (-50), tingkat populasi di Inggris (-49) dan kejahatan (-44). Bahkan mereka yang ingin Inggris untuk tetap di Uni Eropa lebih mungkin untuk mempertimbangkan dampak imigrasi pada daerah-daerah yang negatif.

Kekhawatiran begitu luas bahwa jika narasi kampanye berkurang imigrasi terhadap ekonomi, ada bukti yang menunjukkan argumen imigrasi akan memiliki resonansi yang lebih besar. Pertama, mayoritas orang Inggris (54%) setuju dengan

pandangan bahwa "efek imigrasi sekarang lebih besar daripada manfaat perdagangan apapun Uni Eropa membawa" (21% tidak setuju).

Pemerintah harus memberlakukan batas tahunan pada UK imigrasi dari Uni Eropa dengan dukungan 73% dan menentang sebanyak 12%. Pemerintah harus lebih banyak memihak pada hak warga negara Eropa untuk bekerja di negaranya sendiri dengan dukungan sebesar 53%, sedangkan 26% menentang.

(coman's, 2016)